

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, kualitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang diperoleh variabel penerapan anggaran berbasis kinerja, menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,428. Dari hasil analisis regresi linear berganda tersebut maka hipotesis pertama yakni penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya H1 diterima, sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja yang semakin baik memberikan pengaruh yang baik pula bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Badan keuangan Kabupaten Indramayu telah melaksanakan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan baik. Hal tersebut juga dilakukan tanpa terlepas dari karakteristik anggaran berbasis kinerja diantaranya seperti program, input, output, serta kinerja.
2. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang diperoleh variabel kualitas laporan keuangan, menunjukkan nilai signifikansi 0,007 dan koefisien regresi sebesar 0,198. Dari hasil analisis regresi linear berganda

tersebut maka hipotesis kedua yakni kualitas laporan keuangan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya H2 diterima, sehingga dapat menunjukkan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan maka semakin meningkat juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sudah baik, hal tersebut dapat terwujud berdasarkan karakteristik kualitas laporan keuangan sendiri yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Terwujudnya suatu kualitas laporan keuangan yang baik dan benar akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang diperoleh variabel pengendalian internal, menunjukkan nilai signifikansi 0,017 dan koefisien regresi sebesar 0,270. Dari hasil analisis regresi linear berganda tersebut maka hipotesis ketiga yakni pengendalian internal menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya H3 diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin baik dan efektif pengendalian internal yang dilaksanakan dalam sebuah lembaga pemerintahan maka semakin baik akuntabilitas pada instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu telah terlaksana dengan baik, yakni lingkungan pengendalian, menilai risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi serta kegiatan

pemantauan yang sudah sesuai dengan petunjuk yang mengacu pada prinsip pengendalian internal.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja, kualitas laporan keuangan, dan pengendalian internal menunjukkan bahwa penelitian selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan anggaran berbasis kinerja, kualitas laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Hasil *Adjusted R Square* mencerminkan bahwa tujuan penelitian tercapai yakni penerapan anggaran berbasis kinerja, kualitas laporan keuangan, dan pengendalian internal dapat menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 87% dan sisanya 13% berasal dari variabel lain.

Dilihat dari kesimpulan diatas, maka hasil telah selaras dan menunjukkan berbagai kesamaan dengan beberapa peneliti sebelumnya seperti Wahyuni (2018). Hasil uji variabel kualitas laporan keuangan konsisten dengan penelitian Reyhan (2017) dan Tussakdiyah (2017). Hasil uji variabel pengendalian internal konsisten dengan penelitian Allorante (2020) dan Silalahi (2017).

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Meski penelitian telah terancang dengan baik akan tetapi hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya:

1. Proses penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online menggunakan *Google Form* membuat pengumpulan kuesioner membutuhkan waktu yang lebih lama, hal tersebut dilakukan dikarenakan Covid-19.
2. Ketika dilakukan penyebaran kuisisioner tidak terjadi pertemuan langsung dengan keseluruhan responden sehingga komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dan respondn yang membuat beberapa kuisisioner tidak kembali.
3. Hasil penelitian ini juga hanya dapat dijadikan sebagai bahan analisis pada objek penelitian yang terbatas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, sehingga kemungkinan terdapat ketidaksamaan hasil dan kesimpulan jika dilakukan pada objek yang berbeda.
4. Kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian terdahulu mengenai anggaran berbasis kinerja masih terlalu general karena perbedaan subjek, sehingga perlu dicermati dan disesuaikan kembali setiap butir pertanyaannya.

### **5.3. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan penelitian sejenis, maka dapat melaksanakan penelitian pada subjek lain untuk memberikan pembuktian konsistensi hasil penelitian, selain itu juga dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda dan juga jumlah sampel yang berbeda dengan menyesuaikan masing-masing subjek yang digunakan.
2. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, untuk mengatasi masalah yang ada maka perlu diperhatikan lagi terkait pengelolaan pendapatan dan keuangan daerahnya, sehingga laporan yang nantinya

dihasilkan kepada bupati dapat diterima dengan baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga masalah-masalah yang ada saat ini tidak terjadi perulangan kembali pada tahun selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Allorante, L. T. (2020). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Siste, Pelaporan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Anthony, R.N., dan Govindarajan, V. (2005). *Management Control System*, (Edisi 1). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, (Edisi 2). Jakarta; Penerbit Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, (Edisi 3). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. (2020). *Reviu Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu*.
- Erlina, dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gudono. (2009). *Teori Organisasi*, (Edisi 1). Indonesia: Pensil Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analsis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, (Edisi 9). Semarang: Univeritas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keaungan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hanafi, M. M., dan Halim, A. (2007). *Analisis Laporan Keuangan*, (Edisi 3). Yogyakarta: Penerbit UPP-AMP YKPN

Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman*, (Edisi 6). Yogyakarta: Penerbit BPFE

Haryono, S. (2005). Struktur Kepemilikan Dalam Bingkai Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.5 No.1.

Jensen, C., dan Meckling, W. H (1976). Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol.3 No.4.

Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*, (Edisi 2). Yogyakarta: Penerbit Akademik Manajemen Perusahaan YKPN.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) ri.

Lembaga Administrasi Negara (LAN)), 2003. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Edisi 3). Yogyakarta: Penerbit UU STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, (Edisi 2). Yogyakarta: Penerbit Andi.

\_\_\_\_\_. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*, (Edisi 3), Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Nafarin. (2004). *Penganggaran Perekonomian*, (Edisi 3). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2008 tentang Anggaran dengan Pendekatan Kinerja.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintahan Indonesia.

Reyhan, H. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPS Propinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Silalahi, E. B. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Sugijanto. (2002). Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No 22.25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*, Vol.19 No.1

Tugiman, H. (2006). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Penerbit Kanesus

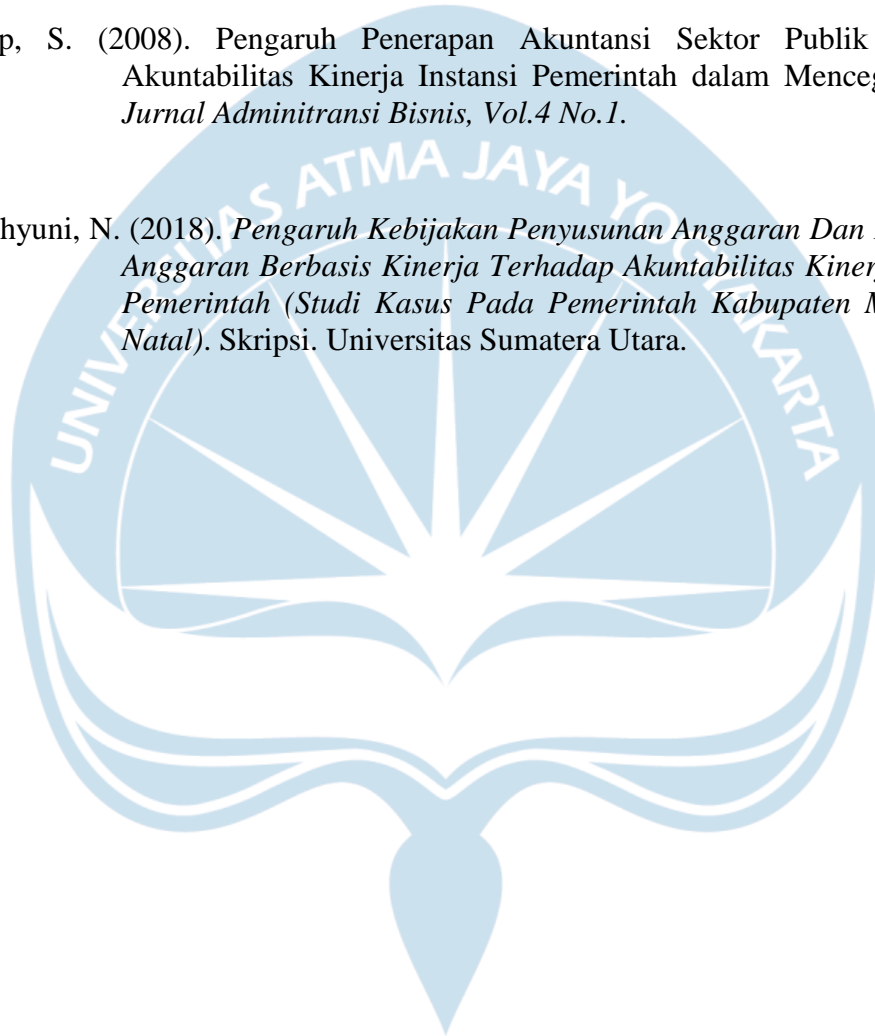
Tussakdiyah, N. (2017). *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Undang-Undang, No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang, No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat.

Urip, S. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Adminitransi Bisnis, Vol.4 No.1.*

Wahyuni, N. (2018). *Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.



## REFERENSI

Indramayukab.go.id (2021, 8 November). SAKIP Indramayu Harus Raih Predikat BB. (Diakses dari <https://indramayukab.go.id/sakip-indramayu-harus-raih-predikat-bb/> )

Bkd.indramayukab.go.id (2021, 5 November) Reviu Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Badan Keaungan Daerah Kabupaten Indramayu. (Diakses dari <https://bkd.indramayukab.go.id/renstra-2016-2021/> )

